



| | | | |
|-------------|--|--------------|--|
| Media Title | Kompas | | |
| Head Line | Draf Perpres Trans-Sumatra Perlu Penajaman | | |
| Date | 25 Maret 2014 | Color | |
| Section | News | Circulation | |
| Page No | 17 | Article Size | |
| Journalist | ARN | Advalue | |
| Frequency | Daily | PR Value | |

JALAN TOL

Draf Perpres Trans-Sumatera Perlu Penajaman

JAKARTA, KOMPAS — Draf peraturan presiden mengenai mekanisme penugasan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera dikembalikan lagi dari Sekretariat Kabinet untuk penajaman.

"Draf dikembalikan lagi untuk penajaman yang berkaitan dengan penjaminan pemerintah. Itu bukan bidang Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi wilayahnya Kementerian Keuangan," jelas Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di Jakarta, Senin (24/3).

Djoko menjelaskan, penajaman yang dilakukan berkaitan dengan definisi jalan tersebut. Definisi ini berkaitan dengan penjaminan negara. "Apa benar semua utang yang keluar untuk

JTTS bisa dijamin negara? Jika badan usaha yang ditugaskan mengeluarkan surat utang atau pinjam dari perbankan, apakah bisa dijamin juga oleh negara? Penyertaan modal negara yang diberikan oleh negara bersifat hanya ekuiti, dan sisanya harus pinjam dari perbankan," ujar Djoko.

Penajaman itu dilakukan untuk memastikan cara yang diambil merupakan cara terbaik. "Apabila penjaminan negara tidak bisa dilakukan di sana, akan diambil cara yang lain," kata Djoko.

Karena masih belum selesai pembahasannya, Djoko memastikan pemancangan tiang pertama (*groundbreaking*) tak akan dilakukan tahun ini. "Tender itu

baru bisa dilakukan jika pembebasan lahan selesai dilakukan. Pembebasan lahan perlu waktu, bisa dua-tiga tahun. Namun, kita bisa mengumumkan bahwa pembangunan jalan tol itu akan dilakukan," kata Djoko.

Sebelumnya, draf sudah diserahkan dari Kementerian PU untuk menentukan apabila badan usaha yang ditugaskan tidak mampu menyelesaikan, penugasan diambil alih Kementerian PU tanpa harus mengeluarkan perpres lagi. Dengan demikian, pekerjaan infrastruktur itu tidak akan terhenti.

Saat ini pembebasan lahan difokuskan ke empat ruas, yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Lampung-Terbanggi, dan ruas Pekanbaru. Jika keempat

ruas itu sudah bebas lahannya, bisa segera ditenderkan atau ditugaskan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto menjelaskan, proses pembebasan lahan ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Infrastruktur bagi Kepentingan Umum.

"Pemerintah tengah menyusun trase proyek ini dan direncanakan sejajar dengan jalan lintas timur (jalintim) Sumatera. Targetnya, tahun ini trasenya bisa selesai. Trasenya juga akan dipilih tidak melewati sawah subur dan wilayah perbukitan yang sulit untuk konstruksi," kata dia.

Menurut Kepala Badan Pengawas Jalan Tol A Gani Gozali, keempat ruas tersebut sudah pernah ditenderkan sejak tahun 2008, tetapi belum ada badan usaha yang tertarik membangunnya.

"Mungkin karena secara finansial keuntungan yang didapat investor hanya 10-12 persen. Pembangunan infrastruktur baru menarik jika mencapai 14 persen. Di ruas-ruas lain, keuntungan yang akan didapat investor di bawah 10 persen. Jadi hanya empat ini yang ditenderkan," kata Gani.

Namun, pihaknya akan meninjau ulang keempat ruas ini karena sudah studi kelayakan sudah dilakukan enam tahun yang lalu. Dan saat ini sudah banyak perubahan dan pertumbuhan di daerah itu. (ARN)